

## BNPB Diminta Optimalkan Petugas Bantu Korban Bencana

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa yang mendalam atas sejumlah musibah bencana alam di Tanah Air yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian materiil. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan bahu membahu membantu para korban serta mengatasi bencana yang terjadi.

“Tahun 2021 baru memasuki pertengahan bulan Januari, namun sudah banyak terjadi bencana alam di Indonesia. Untuk itu, saya menghimbau agar kita semua tetap waspada. BNPB mencatat, ada 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang periode 1-16 Januari 2021. Dari 136 bencana alam itu, sudah merenggut setidaknya 80 korban jiwa dan 858 orang luka-luka,” ujar Bamsot dalam keterangannya, Minggu (17/1).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan bencana alam terbanyak yang terjadi adalah banjir sebanyak 95 kejadian, tanah longsor 25 kejadian, puting beliung 12 kejadian,

gempa bumi 2 kejadian dan gelombang pasang 2 kejadian. Akibat ratusan bencana alam itu, sebanyak 405.584 orang terdampak dan mengungsi.

“Belum lagi dua bencana besar berupa banjir di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan setidaknya 5 orang meninggal dan 112 ribu orang mengungsi. Serta, gempa berkekuatan 6,2 M mengguncang Sulawesi Barat yang menyebabkan 56 orang meninggal dunia dan 637 orang luka-luka,” kata Bamsot.

Oleh karena itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melaksanakan proses evakuasi yang aman bagi warga yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Kemensos, Pemda Setempat, dan BNPB juga diminta untuk menyiapkan tempat penampungan bagi warga, bantuan-bantuan yang dibutuhkan para korban bencana seperti tenda, selimut, obat-obatan, serta dapur umum dan MCK. • mei

## Merapi Keluarkan Lava Pijar 36 Kali, Jarak Luncur 1,5 Km

YOGYAKARTA (IM) - Aktivitas Gunung Merapi semakin meningkat, Minggu (17/1) pagi ini. Setidaknya, dalam enam jam tercatat gunung api teraktif di Indonesia ini 36 kali mengeluarkan lava pijar.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida mengatakan, aktivitas Merapi saat ini masih tinggi. Sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB Gunung Merapi mengeluarkan lava pijar sebanyak 36 kali menuju ke barat daya. “Jarak luncur maksimal lava pijar terpantau sejauh 1,5 km,” terangnya Minggu (17/1).

Dijelaskannya, untuk

asap kawah teramati dengan ketinggian 50 meter di atas puncak kawah. Gunung juga terlihat jelas hingga berkabut antar I sampai III.

Secara kegemapan dalam enam jam tersebut sebanyak 43 kali gempa guguran, gempa fase banyak 6 kali, tidak ada kegemapan lain.

Sebelumnya, sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada tanggal 16 Desember, juga terlihat 20 kali guguran lava pijar.

Untuk periode tersebut jarak luncur lava pijar 1000 meter atau 1 kilometer dari puncak dengan arah luncuran yang masih sama, yaitu barat daya. “Status Merapi masih sama yaitu siaga atau level III,” ujarnya. • mei



IDN/ANTARA

### DOA UNTUK INDONESIA

Warga menyalakan lilin dan berdoa bersama untuk Indonesia dalam aksi solidaritas di Srewedari, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (16/1). Aksi tersebut untuk mendoakan korban bencana alam dan musibah di Indonesia serta segera hilangnya virus COVID-19.

## MK Terbelah di Permohonan Presidential Threshold Rizal Ramli

JAKARTA (IM) - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap aturan ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) yang diajukan Rizal Ramli.

Ternyata, dari 9 hakim konstitusi, 4 di antaranya menilai permohonan uji materi terhadap aturan presidential threshold yang diajukan Rizal Ramli layak diadili.

Keempat hakim MK yang setuju permohonan Rizal Ramli diadili adalah Suharto, Manahan MP Siantan, Saldi Isra, dan Enny Nurbanih. Selain Rizal Ramli, ikut menjadi pemohon Abdulrachim Kresno sebagai pemohon II.

“Pertama, bahwa Pemohon II adalah warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang akan menyelenggarakan pemerintahan,” kata Saldi Isra-Suharto-Manahan-Enny dalam dissenting opinion di putusan MK yang dikutip, Minggu (18/1).

Kedua, bagi Abdulrachim Kresno, ambang batas

pen Calonan presiden berpotensi mengabaikan hak konstitusional Abdulrachim Kresno yang menjadi terbatas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Fakta empirik yang dikemukakan, akibat ambang batas calonan presiden, penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

“Ketiga, bahwa selain kedua alasan di atas, ditambahkan Pemohon II, penerapan ambang batas calonan presiden dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan presiden,” ujarnya.

Menurut 4 hakim konstitusi itu, berdasarkan berbagai kasus serupa di MK, khususnya bagian kedudukan hukum, semua pemohon berada pada titik awal berpijak yang nyaris sama, yaitu merupakan pemilih.

Bagi mereka, hak pilih mereka sebagai warga negara menjadi terbatas atau mempersempit kontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden selama norma ambang batas untuk pengusul calon presiden (*presidential threshold*) tetap dipertahankan. • han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



KORPS MARINIR TNI AL BANTU EVAKUASI WARGA Sejumlah Prajurit Korps Marinir TNI AL Pasmar 1 Jakarta menggunakan perahu karet di Desa Pekauman Ulu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (16/1). Sebanyak 77 personel dari Prajurit Korps Marinir TNI AL Pasmar 1 Jakarta membawa 28 perahu karet serta perlengkapan lainnya melaksanakan misi kemanusiaan untuk membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

## Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangannya Tetap Jalan dan Beredar

Pemblokiran rekening FPI dan orang-orang yang terafiliasi dengan organisasi tersebut memudahkan PPATK melacak sumber dan peruntukan dana yang mereka dapat.

JAKARTA (IM) - Kepala Transaksi Keuangan (PPATK) Pusat Pelaporan dan Analisis Dian Ediana Rae menyam-

paikan alasan pihaknya memblokir rekening Front Pembela Islam (FPI) usai dibubarkan pemerintah.

Menurut Dian, PPATK perlu menelusuri jejak keuangan FPI, sebab aktivitas keuangan merupakan salah satu unsur dari seluruh kegiatan organisasi masyarakat.

“Salah satu komponen penting dari organisasi kan

adalah komponen uang. Uang ini kan aneh juga kalau FPI-nya bubar tapi uangnya jalan dan beredar kan aneh juga,” kata Dian dalam diskusi virtual di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (17/1).

“Nah sehingga kita memang harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan apakah ada yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan,” kata Dian.

Dian lebih lanjut menjelaskan bahwa pemblokiran rekening FPI juga bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana FPI selama ini.

Dian menyatakan pemblokiran rekening FPI dan orang yang terafiliasi dengan organisasi tersebut seperti Munarnan juga memudahkan pihaknya dalam melacak sumber dan peruntukan dana yang diperoleh.

“Kalau tidak kan nanti masih bergerak terus rekeningnya, ini kan enggak bisa diperiksa.

Karena kita kan ukurannya ketika pemerintah mengambil keputusan itulah kemudian kita blokir kemudian kita lihat sekarang. Proses analisis itu yang kita sedang lakukan sekarang,” ucap Dian.

Sebagai informasi, hingga Senin (11/1) lalu, PPATK sudah membekukan sementara 87 rekening milik FPI danafiliasinya.

Jumlah itu bertambah dari Jumat (8/1). Saat itu, PPATK hanya membekukan 79 rekening yang terafiliasi dengan FPI. “Ada 89. Paling banyak sebetulnya rekening organisasi dari pusat maupun cabang-cabang. Tapi kemudian individu yang di dalamnya,” kata Dian.

Bertambahnya jumlah rekening yang diblokir disebabkan sejumlah hal, antara lain proses penelusuran yang masih terus berkembang. Selain itu, ia menuturkan, pemblokiran rekening juga bertujuan untuk mengetahui sumber pendanaan dan FPI selama ini. • mei

## Update Musibah Longsor di Sumedang, 28 Korban Meninggal Berhasil Ditemukan

JAKARTA (IM) - Tim SAR (Search and Rescue) Gabungan kembali menemukan 3 (tiga) korban meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (16/1).

Merujuk data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

per hari Minggu 17 Januari 2020 pukul 03.59 WIB, total korban yang berhasil ditemukan tim gabungan berjumlah 28 orang dan 12 orang masih

dinyatakan hilang.

Pencarian korban terkendala dengan cuaca hujan dan perlu diwaspadai longsor susulan, karena seperti yang diinformasikan Badan Geologi, masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor, sehingga tim gabungan perlu menjaga keselamatan saat melakukan evakuasi.

“Tim gabungan menggunakan 4 (empat) alat berat dalam proses evakuasi korban selama beberapa hari kedepan,” jelas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi

Kebencanaan BNPB, Dr. Raditya Jati.

Data sementara sebanyak 1.020 jiwa mengungsi terbagi di pos pengungsian Lapangan Taman Burung dan rumah kerabat yang aman dari potensi longsor.

Perlu diketahui longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini telah terjadi pada Sabtu (9/1), longsor terjadi dua kali, pertama pukul 16.00 WIB dan longsor susulan terjadi pada pukul 19.00 WIB. • mei

## Jubir: Seseorang Berstatus OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, seseorang yang berstatus orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 tetap bisa diberi vaksin. Hal tersebut sekaligus memastikan bahwa orang yang akan menjalani vaksinasi tidak perlu harus tes swab polymerase chain reaction (PCR) terlebih dahulu.

“Tetap vaksin saja, tidak harus periksa (tes swab dulu),” ujar Nadia, Minggu (17/1).

Bagi OTG yang terlanjur divaksin Covid-19, kata dia, tidak akan ada efek membahayakan yang diterima bersangkutan. Walaupun dalam Surat Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Co-

vid-19 tidak disebutkan jelas apakah OTG bisa mendapat vaksin atau tidak.

“Tidak apa-apa (OTG) divaksin Covid-19 dan tidak beresek buruk,” katanya.

Dalam SK tersebut sudah diatur mengenai skrining sebelum vaksinasi. Penerima vaksin akan diperiksa riwayat kesehatan dan kondisi sebelum vaksinasi dengan menjawab beberapa pertanyaan serta pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh.

Skrining tersebut juga ditujukan untuk mengurangi risiko reaksi berat yang terjadi setelah penyuntikan vaksin ke dalam tubuh. Meski demikian, apabila seorang OTG lolos skrining, maka tetap akan diberi vaksin dan tidak memiliki efek berbahaya bagi yang bersangkutan.

Pasalnya antibodi dalam tubuh OTG, dinilai belum optimal dalam menghadapi

virus Covid-19 sehingga pemberian vaksin akan meminimalkan risiko penularan. Secara umum, mereka yang memiliki riwayat konfirmasi Covid-19, wanita hamil, menyusui, usia di bawah 18 tahun, serta beberapa kondisi komorbid tidak bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Saat ini, Indonesia sudah mulai menjalankan vaksinasi nasional. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac produksi Tiongkok yang telah dibeli pemerintah sebanyak 3 juta dosis. Kelompok prioritas penerima vaksin tersebut adalah penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun dengan sasaran berupa tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • mei



IDN/ANTARA

**PERAWATAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PANGLIMA POLEM** Pekerja membersihkan kompleks makam pahlawan nasional Panglima Polem di Desa Lamsie, Aceh Besar, Aceh, Minggu (17/1). Panglima Polim diangkat sebagai pejabat Panglima Sagoe XXII Mukim dengan gelar tambahan Sri Muda Setia Peurkasa pada masa pemerintahan Sultan Tuanku Muhammad Daud Syah (1884-1903) itu merupakan sosok pejuang Aceh yang gigih melawan kolonial Belanda.

## Ini Alasan Muhaimin Iskandar Desak Mendikbud Nadiem Makarim Diganti

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan alasan mengapa dirinya meminta menteri Pendidikan saat ini, Nadiem Makarim, segera diganti.

Dia melihat, saat ini krisis atau darurat pendidikan yang terjadi sepanjang pandemi Covid-19 belum bisa tertangani dengan baik dan belum ada terobosan yang dilakukan Nadiem sebagai solusi dalam mengatasi darurat pendidikan nasional.

“Menteri Pendidikan yang kita harapkan dengan teknologi yang dia miliki, mengambil inisiasi untuk mengambil langkah-langkah alternatif bagi krisis darurat nasional pendidikan, tetapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda hal yang bisa diharapkan dari Menteri Pendidikan kita,” Muhaimin Iskandar saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) 15 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB secara virtual.

Oleh karena itu, dia sudah meminta Ketua Komisi X DPR yang juga Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda untuk mengambil inisiasi atas krisis stagnasi pendidikan nasional.

“Saya mengusulkan Menteri Pendidikan segera diganti dengan Syaiful Huda dari Ketua Komisi X supaya ada penanganan yang cepat dari stagnasi pendidikan nasional kita,” ujarnya.

Hingga saat ini kata dia, tidak ada terobosan nyata yang bisa dirasakan Mendikbud dalam menangani darurat pendidikan nasional.

“Saya pendukung utama Pak Nadiem karena saya harap-

kan kecanggihan Pak Nadiem dalam menngani teknologi, menngani gojek, menngani sistem perdagangan baru melalui online. luar biasa, salut,” katanya.

Dia berharap, kemampuan Nadiem Makarim tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kemampuan menata dan mengelola pendidikan nasional.

“Tapi sudah satu tahun lebih, hampir dua tahun, belum ada tanda-tanda baru yang bisa kita rasakan. Tolong sampaikan ke Pak Nadiem bahwa Indonesia darurat pendidikan, butuh penanganan yang serius. Tidak bisa sambil lalu. Menangani soal pendidikan tidak bisa sambil guyonan, gak bisa sambil gojek.”

Gojek itu kalau bahasa Yoga itu bercanda. Gojekan itu namanya bercanda, gak bisa sambil bercanda dalam menngani krisis pendidikan kita,” tuturnya.

Menurut Cak Imin –panggilan Muhaimin Iskandar, akibat dari krisis pendidikan nasional, ada dua hal sekaligus yang mengalami kelumpuhan.

Pertama, lumpuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, lumpuhnya masa depan sumber daya manusia dan masa depan nasib generasi penerus bangsa.

“Banyak stagnasi terjadi. Kurikulum kita banyak yang terlambat, butuh penanganan,” katanya.

“Nah dalam posisi ini, di tengah pandemi, ekonomi sulit, pembangunan hancur. Saya sudah berteriak-teriak berkali-kali, kehancuran pendidikan nasional nyata di depan mata kita, tetapi belum ada penanganan yang serius dan bisa dirasakan hasilnya,” tandasnya. • han

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT EMPORIA DIGITAL RAYA (“Perseroan”) tertanggal 23 Desember 2020 nomor 30, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan untuk meningkatkan Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan, dimana penyeroran saham baru dilakukan dengan cara konversi hutang Perseroan kepada salah satu pemegang saham Perseroan, yaitu PT ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk sebesar Rp. 73.500.000.000 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah).

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999.

Jakarta, 18 Januari 2021  
Direksi Perseroan

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Notulen Rapat Pembina Tanggal 13-01-2021, Diputuskan bahwa

Yayasan Mudita Berkah Utama, Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, terhitung Tanggal 13-01-2021.

### DIBUBARKAN

Dan menunjuk Ibu Susana Tanudjaja selaku Likuidator

Kota Tangerang Selatan, 18 Januari 2021.

Likuidator  
Yayasan Mudita Berkah Utama